



# **POLICY BRIEF**

## **Dari Kerentanan Menuju Ketahanan: Reformasi Dukungan Ekonomi Petani Sawit Selama Masa Tunggu Program Peremajaan Sawit Rakyat.**

### **EXECUTIVE SUMMARY**

Sektor pertanian merupakan penopang penting perekonomian Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap PDB nasional. Di dalamnya, subsektor perkebunan khususnya kelapa sawit menjadi komponen strategis yang tidak hanya menyokong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat di pedesaan. Provinsi Riau sebagai produsen kelapa sawit terbesar di Indonesia memainkan peran kunci dalam rantai pasok minyak sawit global. Namun, di balik kontribusi tersebut, petani sawit rakyat menghadapi tantangan serius, terutama saat mengikuti Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Masa tunggu 3–4 tahun tanpa hasil kebun menciptakan kerentanan ekonomi yang mengancam keberlanjutan penghidupan petani. Policy brief ini disusun untuk menawarkan solusi kebijakan guna memastikan bahwa transformasi sektor sawit berjalan inklusif, adaptif, dan melindungi kesejahteraan petani. Melalui tiga agenda kebijakan utama yang berorientasi pada penguatan mata pencaharian berkelanjutan: (1) Pelatihan keterampilan non-pertanian dan diversifikasi penghasilan berbasis lokal, (2) Pengembangan kewirausahaan pasca-pelatihan, dan (3) Penguatan kelembagaan lokal sebagai pusat inkubasi livelihood petani. Reformasi dukungan ekonomi ini penting untuk memastikan petani mampu bertahan, mengurangi risiko hutang, meningkatkan kepercayaan terhadap PSR, dan menjaga keberlanjutan program peremajaan nasional.

---

#### **PENULIS:**

Defy Rizky Ramadhany, S.A.P., MPA  
Chelina Putri Patrysa, S.A.P  
Adellya Fasha Isradhianti, S.IP., MPA  
Shafira Riqz, S.Si., MPP

#### **DITUJUKAN KEPADA:**

BPDPKS  
PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
DINAS PERTANIAN PROVINSI RIAU  
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIAK



### PENDAHULUAN

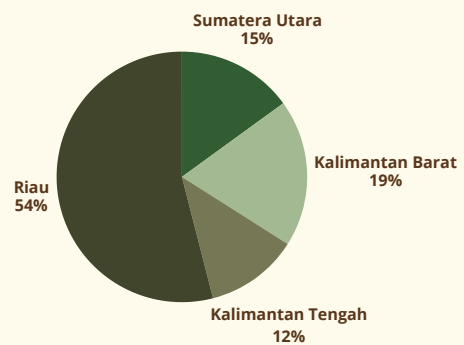
Sektor pertanian memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Hal ini tercermin dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai sekitar 12,61 persen pada tahun 2025 (Badan Pusat Statistik, 2025). Salah satu subsektor yang memiliki potensi besar adalah subsektor perkebunan, dengan sumbangan sebesar 4,17 persen terhadap PDB pada tahun yang sama (Badan Pusat Statistik, 2025).

Di antara berbagai komoditas perkebunan, kelapa sawit merupakan produk dengan nilai produksi tertinggi. Komoditas ini memegang peranan penting dalam perekonomian nasional karena mampu menghasilkan minyak nabati yang menjadi kebutuhan utama berbagai sektor industri (Badan Pusat Statistik, 2025). Pada periode 2023–2024, Indonesia tercatat sebagai produsen minyak sawit mentah (CPO) terbesar di dunia, dengan kontribusi sekitar 59 persen terhadap produksi global. Provinsi Riau menjadi salah satu wilayah utama yang menopang produksi tersebut (Majid et al., 2021; U.S Department Of Agriculture, 2024). Perkebunan kelapa sawit di Indonesia terbagi menjadi tiga jenis yaitu: Perkebunan Besar Nasional, Perkebunan Besar Swasta dan Perkebunan Rakyat. Berikut adalah data persentasi luas lahan kelapa sawit dari 5 besar provinsi penghasil kelapa sawit. Namun saat ini, produktivitas kelapa sawit Provinsi Riau mengalami masalah penurunan produktivitas dan mengakibatkan penurunan pendapatan petani, salah satu penyebab penurunan ini adalah pohon kelapa sawit yang sudah tua dan mulai tidak produktif (Redaksi Info Sawit, 2023).

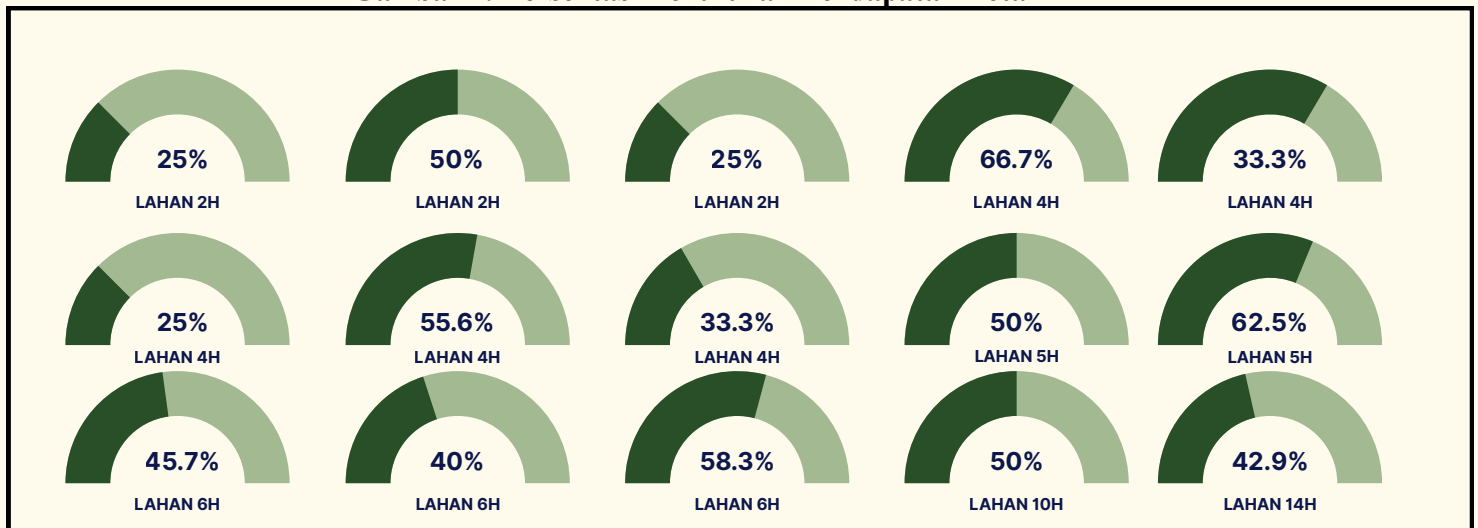
Salah satu upaya penting untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor ini adalah Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk menggantikan tanaman sawit tua dengan bibit unggul yang lebih produktif dan berkelanjutan (BPDPKS, 2020).

Program Peremajaan Sawit Rakyat hadir untuk menjawab permasalahan keberlanjutan dan peningkatan produktivitas kelapa sawit. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani, serta keberlanjutan lingkungan (Ramli & Djumena, 2024). Sehingga seharusnya program PSR merupakan strategi yang tepat untuk Provinsi Riau, dalam memanfaatkan lahan yang ada tanpa menambah ekspansi lahan (Purba, 2019). Namun disisi lain, dalam pelaksanaannya petani kelapa sawit harus melewati masa tunggu yaitu dimulai pada saat bibit unggul selesai ditanam hingga panen perdana yang membutuhkan estimasi sekitar 3,5 tahun – 4,5 tahun (BPDPKS, 2020). Sehingga berimplikasi pada hilangnya pendapatan petani secara signifikan. Kondisi ini menciptakan kerentanan ekonomi yang mengancam keberlanjutan program PSR, terutama bagi petani kecil yang sangat bergantung pada satu sumber pendapatan, yaitu kebun sawit. Hasil studi lapangan tesis di Kampung Teluk Merbau menunjukkan rendahnya keterampilan alternatif, terbatasnya modal, minimnya tabungan, kebijakan teknis yang tidak sesuai konteks lokal, serta lemahnya desain pendampingan sebagai faktor utama yang memperburuk kondisi petani selama masa tunggu.

**Gambar 1. Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat**



**Gambar 2. Persentasi Penurunan Pendapatan Petani**



### DAMPAK MASALAH

Kerentanan ekonomi selama masa tunggu PSR menimbulkan rangkaian dampak yang saling memperkuat dan berpotensi mengancam keberlanjutan program peremajaan sawit secara nasional. Dampak utama yang paling dirasakan adalah meningkatnya hutang petani. Ketika kebun diremajakan dan tidak menghasilkan selama 3–4 tahun, petani kehilangan sumber pendapatan utama. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, membiayai pendidikan, membeli pangan, hingga membayar kewajiban sosial, petani terpaksa berutang kepada tengkulak, koperasi, atau lembaga keuangan informal. Tingkat bunga yang tidak terkendali memperburuk tekanan ekonomi.

Selain itu, masa tunggu juga menyebabkan melemahnya kapasitas petani untuk mengembangkan sumber usaha alternatif. Minimnya keterampilan di luar kelapa sawit membuat petani tidak mampu memanfaatkan peluang ekonomi lain seperti tanaman pangan, perikanan, atau usaha kecil. Ketidakmampuan ini menciptakan ketergantungan berkelanjutan pada bantuan eksternal dan mempersempit peluang peningkatan pendapatan jangka panjang.

Dampak yang lebih serius adalah risiko kegagalan kebun pasca peremajaan. Petani yang tidak mampu bertahan secara ekonomi selama masa tunggu cenderung mengabaikan praktik pemeliharaan tanaman muda, tidak membeli pupuk, atau tidak melakukan pemeliharaan rutin. Hal ini dapat mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak optimal dan produksi menurun saat kebun mulai berbuah.

Kerentanan ini juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Program PSR. Banyak petani yang ragu mengikuti program karena melihat beban masa tunggu yang berat, sehingga target nasional peremajaan seluas 180.000 hektare per tahun sulit tercapai.

### APA YANG MENYEBABKAN TERJADINYA MASALAH/ISU TERSEBUT ?

Akhirnya, dampak yang paling mendasar adalah penurunan pendapatan petani secara signifikan. Kehilangan pendapatan 100 persen selama masa tunggu membuat kesejahteraan keluarga petani mengalami deteriorasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan angka kemiskinan dan menimbulkan ketegangan sosial di tingkat komunitas. Hal ini dapat terlihat dari data studi kasus berikut ini, yang didapatkan dari beberapa informan pertanian dilapangan:

Kerentanan ekonomi petani selama masa tunggu PSR tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari faktor struktural, kelembagaan, dan sosial yang telah berlangsung sejak lama.

Penyebab pertama adalah ketiadaan exit strategy dalam kebijakan pengembangan sawit sebelumnya. Selama masa produktif sawit (sekitar 25 tahun), petani sangat bergantung pada pendapatan tunggal dari sawit. Kebijakan intensifikasi produksi tidak disertai strategi diversifikasi ekonomi. Akibatnya, ketika sawit memasuki usia tidak produktif dan perlu diremajakan, petani tidak memiliki keterampilan alternatif, modal finansial, ataupun rencana livelihood yang mampu menopang kehidupan mereka.

Kedua, harga sawit sangat fluktuatif dan berada dalam struktur pasar monopsoni. Harga TBS ditentukan oleh perusahaan dengan kekuatan pasar lebih dominan, sementara petani tidak memiliki daya tawar yang memadai. Fluktuasi harga dunia semakin memperburuk volatilitas pendapatan. Ketika pendapatan tidak stabil, petani sulit menabung atau menyisihkan dana untuk biaya hidup masa tunggu. Kondisi ini menciptakan situasi rentan yang kronis.

Penyebab ketiga adalah rendahnya literasi keuangan petani. Tingkat pendidikan yang terbatas, minimnya pengetahuan tentang perencanaan keuangan, dan tidak adanya instrumen simpanan yang mudah diakses menyebabkan petani tidak mempersiapkan dana darurat. Banyak petani cenderung mengonsumsi pendapatan saat ini tanpa merencanakan jangka panjang. Hal ini membuat mereka tidak memiliki bantalan finansial ketika kebun diremajakan.

Keempat, ketidaksesuaian desain kebijakan teknis dengan konteks lokal. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2025 mewajibkan penanaman padi gogo sebagai tanaman sela, dengan tujuan meningkatkan ketahanan pangan dan memberi pendapatan tambahan. Namun kebijakan ini tidak mempertimbangkan kapasitas lokal, terutama di Provinsi Riau, di mana mayoritas petani sawit tidak memiliki pengalaman bercocok tanam selain kelapa sawit. Penanaman padi gogo membutuhkan pengetahuan teknis, kesesuaian lahan, serta perawatan yang tidak semua petani mampu lakukan. Konsekuensinya, tanaman sela tidak memberikan manfaat ekonomi yang signifikan dan justru menjadi beban tambahan.

Secara keseluruhan, akar masalah utama berakar pada ketergantungan tunggal pada sawit, kerentanan pasar, lemahnya literasi keuangan, dan kebijakan teknis yang kurang kontekstual. Isu ini membutuhkan reformasi dukungan ekonomi yang lebih adaptif, holistik, dan sensitif terhadap kondisi lokal.

### REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk mengatasi kerentanan ekonomi petani selama masa tunggu Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), diperlukan agenda kebijakan yang komprehensif, kontekstual, dan berorientasi pada ketahanan penghidupan petani. Policy Brief ini mengusulkan tiga kebijakan utama yang saling melengkapi. Setiap kebijakan didesain tidak hanya untuk mengurangi kerugian pendapatan selama masa tunggu, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas adaptif petani dalam jangka panjang.

#### KEBIJAKAN 1

##### **1. Integrasi Pendekatan Sustainable Livelihood Approach (SLA) dalam SOP Program PSR**

Kebijakan pertama ditujukan untuk pengeola pusat. Kebijakan ini berfokus pada reformasi mendasar Program PSR melalui integrasi pendekatan Sustainable Livelihood Approach (SLA) ke dalam SOP pelaksanaan program. Program PSR selama ini lebih banyak menitikberatkan pada aspek teknis replanting, seperti persyaratan administratif, tata cara peremajaan, dan peningkatan produktivitas di tingkat kebun. Namun, pendekatan tersebut belum sepenuhnya memperhitungkan kerentanan ekonomi dan sosial yang dialami petani selama masa tunggu. Kondisi ini menunjukkan perlunya transformasi SOP PSR agar lebih komprehensif dan manusiawi, dengan menempatkan penghidupan petani sebagai fokus utama.

Integrasi SLA melibatkan analisis aset-aset penghidupan (human, financial, natural, social, physical capital) yang dimiliki petani serta identifikasi risiko yang berpotensi menghambat keberlanjutan ekonomi mereka. SOP PSR yang baru harus mencakup asesmen penghidupan awal (livelihood baseline assessment), penyusunan rencana penghidupan selama masa tunggu, serta integrasi strategi diversifikasi pendapatan sebagai bagian resmi dari prosedur program. Pendamping lapangan PSR juga perlu dibekali pelatihan SLA agar dapat melakukan bimbingan secara efektif dan responsif terhadap kondisi petani.

Dengan mengadopsi SLA, PSR tidak lagi dilihat sebagai program teknis semata, tetapi sebagai program pembangunan kesejahteraan petani yang holistik. Pendekatan ini memastikan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari produktivitas kebun pasca-replanting, tetapi juga dari kemampuan petani menjaga stabilitas ekonomi keluarga selama masa tunggu.

### REKOMENDASI KEBIJAKAN

#### KEBIJAKAN 2

##### 2. Program Pelatihan Keterampilan Non-Pertanian & Diversifikasi Penghasilan Berbasis Lokal

Program ini bertujuan memberikan keterampilan alternatif serta pendapatan jangka pendek (short-term) dan jangka menengah (medium-term).

Short-term livelihoods:

- Tanaman musim pendek (jagung, cabai, sayur cepat panen)
- Pekarangan produktif
- Tumpang sari sesuai regulasi PSR

Medium-term livelihoods:

- Budidaya perikanan air tawar (lele, nila, patin)
- Peternakan ayam petelur atau ayam kampung petelur

Program ini membutuhkan dukungan modal mikro, input awal, dan pendampingan teknis sebagai jaminan keberhasilan. Diversifikasi berbasis lokal memastikan usaha dapat segera memberikan pendapatan dan relevan dengan kebutuhan pasar setempat. Di Kabupaten Siak, Dinas Pertanian sebenarnya telah memfasilitasi upaya short-term livelihood, khususnya melalui penyediaan bibit tanaman pangan hortikultura (pajale – padi, jagung, kedelai) dan bibit sayuran secara gratis. Namun upaya ini belum optimal karena beberapa faktor : fasilitasi bibit belum dibarengi pelatihan intensif, banyak petani tidak memiliki kompetensi teknis untuk mengelola tanaman pangan/ hortikultura secara optimal, sehingga tingkat keberhasilan rendah, pendampingan tidak berjalan secara berkelanjutan, padahal diversifikasi membutuhkan monitoring teknis rutin, belum ada program terstruktur untuk membangun skill non-pertanian, padahal sebagian petani berminat mencari peluang kerja alternatif (usaha kecil, jasa, atau keterampilan lain). Akibatnya, diversifikasi yang dilakukan petani masih bersifat tidak berkelanjutan, dan tidak memberikan dampak signifikan pada stabilitas pendapatan. Untuk itu diperlukan pelatihan yang intensif

#### KEBIJAKAN 3

##### 3. Pengembangan Kewirausahaan dari Hasil Program Pelatihan

Pelatihan tidak cukup tanpa fasilitasi usaha. Oleh karena itu, perlu dibangun inkubator kewirausahaan desa yang dikelola koperasi/BUMDes untuk:

- Mendampingi pemasaran produk hasil usaha
- Memberikan pelatihan lanjutan manajemen usaha
- Menghubungkan petani dengan pasar dan mitra usaha
- Menyediakan akses modal kecil melalui skema pinjaman mikro

Tujuan jangka panjangnya adalah menciptakan petani yang mampu membangun usaha mandiri, tidak lagi sepenuhnya bergantung pada sawit, dan memiliki keterampilan adaptif untuk menghadapi masa tunggu PSR.

Implementasi kebijakan dapat dilihat pada lampiran

# POLICY BRIEF

DARI KERENTANAN MENUJU KETAHANAN: REFORMASI  
DUKUNGAN EKONOMI PETANI SAWIT SELAMA MASA  
TUNGGU PROGRAM PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT.

## REFERENCE

- Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik Indonesia 2025. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/8cfe1a589ad3693396d3db9f/statistik-indonesia-2025.html>
- BPDPKS. (2020, August 18). Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- Majid, N. A., Ramli, Z., Sum, S. M., & Awang, A. H. (2021). Sustainable palm oil certification scheme frameworks and impacts: A systematic literature review. *Sustainability (Switzerland)*, 13(6). <https://doi.org/10.3390/su13063263>
- Purba, J. H. V. (2019). Replanting policy of Indonesian palm oil plantation in strengthening the implementation of sustainable development goals. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 336(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/336/1/012012>
- Ramli, R. R., & Djumena, E. (2024, March 28). Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2024/03/28/174000226/program-peremajaan-sawit-rakyat-tidak-pernah-capai-target>
- Redaksi Info Sawit. (2023, September 7). Peremajaan Sawit Rakyat di Riau Capai 4.150 Hektare, Dari Target 10.550 hektare. Info Sawit. <https://www.infosawit.com/2023/09/07/peremajaan-sawit-rakyat-di-riau-capai-4-150-hektare-dari-target-10-550-ha/>
- U.S Department Of Agriculture. (2024). Production - Palm Oil. U.S Department Of Agriculture. <https://fas.usda.gov/data/production/commodity/4243000>

### LAMPIRAN

Tahap	Kegiatan Rinci	Output	Penanggung Jawab
I. Persiapan dan Perencanaan	1. Pemetaan minat dan kapasitas petani PSR di tiap kampung	Data minat usaha & baseline petani	Dinas Pertanian, Pemerintah Desa, Penyuluh
	2. Identifikasi potensi pasar lokal (hortikultura, ikan, ayam petelur)	Profil pasar & komoditas prioritas	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Diskop-UMKM
	3. Penyusunan kurikulum pelatihan short-term & medium-term	Modul pelatihan lengkap	Dinas Pertanian, Balai Diklat
	4. Koordinasi pendanaan & bantuan input (KUR, BLU, koperasi)	Skema pendanaan disepakati	Dinas Koperasi, Bank Himbara, BUMDes
II. Implementasi Pelatihan	5. Pelatihan intensif hortikultura cepat panen	Petani memiliki skill teknis	Dinas Pertanian, Penyuluh
	6. Pelatihan budidaya lele/nila/patin	Petani menguasai SOP budidaya	Dinas Perikanan
	7. Pelatihan peternakan ayam petelur	Petani menguasai teknis produksi	Dinas Peternakan / UPT Peternakan
	8. Pelatihan skill non-pertanian (bengkel, menjahit, kuliner, dll.)	Petani terlatih skill alternatif	Dinas Tenaga Kerja, UMKM Center
III. Penyediaan Bantuan & Modal Awal	9. Pemberian bibit pajale + pupuk dasar	Usaha short-term mulai berjalan	Dinas Pertanian
	10. Pemberian benih ikan + pakan 1 bulan	Kolam mulai berproduksi	Dinas Perikanan
	11. Pemberian ayam petelur + kandang sederhana	Produksi telur dimulai	Dinas Peternakan

### LAMPIRAN

Tahap	Kegiatan Rinci	Output	Penanggung Jawab
I. Pendampingan Teknis 12 Bulan	12. Monitoring usaha setiap 2 minggu	Perbaikan teknis tepat waktu	Penyuluh pertanian/perikanan
	13. Konsultasi kelompok (WA Group)	Komunikasi teknis responsif	Penyuluh
	14. Evaluasi biaya-pendapatan tiap 3 bulan	Analisis kelayakan usaha	Dinas Pertanian & Desa
V. Penguatan akses Pasar	15. Kemitraan dengan warung & UMKM lokal	Akses pasar terjamin	BUMDes/Koperasi
	16. Penjualan produk melalui koperasi/BUMDes	Jalur pemasaran stabil	Koperasi, BUMDes
	17. Fasilitasi penjualan digital	Akses pasar online	Diskop-UMKM, BUMDes
VI. Evaluasi & Penyesuaian Program	18. Evaluasi triwulan (produksi & pendapatan)	Status keberlanjutan petani	Dinas Pertanian
	19. Evaluasi tahunan & rekomendasi	Penyempurnaan program	Pemkab Siak
	11. Pemberian ayam petelur + kandang sederhana	Produksi telur dimulai	Dinas Peternakan